p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

KOMITMEN *ZERO ACCIDENT* PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Oleh:

Riofaldo Setya Kasih

22400007

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

riofaldosetyakasih@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Munculnya berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan pangan dalam program ini menjadi persoalan penting. Fenomena terjadi di Kota Surakarta di mana dari awal pelaksanaan Januari 2025 sampai Juni 2026, Kota Surakarta berhasil mempertahankan nol kasus keracunan. Kondisi tersebut menarik peneliti untuk meneliti bagaimana komitmen *zero accident* diterapkan di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan *zero accident* pada pelaksanaan program MBG. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Analisis komitmen menggunakan teori *Three-Component Model of Organizational Commitment* Meyer dan Allen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta diwujudkan melalui empat bentuk utama, yaitu respons cepat terhadap kebijakan melalui pembentukan Satgas MBG dan koordinasi lintas sektor; penguatan komitmen melalui deklarasi *zero accident* oleh Wali Kota; pembangunan sistem pengawasan terintegrasi; serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ketiga dimensi komitmen ditemukan dalam rangkaian tindakan tersebut. Komitmen afektif terlihat melalui kepedulian dan keterlibatan langsung pemerintah, komitmen normatif melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan tanggung jawab moral, sedangkan komitmen berkelanjutan diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi yang dipertahankan secara konsisten.

Kata kunci: Komitmen Organisasi; *Zero Accident*; Program Makan Bergizi Gratis; Pemerintah Kota Surakarta.

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a government policy aimed at improving the population's nutritional intake. The emergence of various cases of food poisoning in a number of regions underscores the importance of maintaining food safety within this program. This phenomenon was observed in the city of Surakarta, where from the program's launch in January 2025 through June 2026 the city successfully maintained zero cases of food poisoning. These circumstances prompted researchers to investigate how the "zero accident" commitment is implemented in the city of Surakarta. This study aims to describe and analyze the Surakarta City Government's commitment to achieving "zero accidents" in the implementation of the MBG program. The study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected through purposive sampling based on their involvement in the implementation and monitoring of the MBG program. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model, following the stages of data collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. Commitment was analyzed using Meyer and Allen's Three-Component Model of Organizational Commitment. The research findings indicate that the Surakarta City Government's commitment is manifested in four main ways: a rapid response to policy through the establishment of the MBG Task Force and cross-sectoral coordination; the reinforcement of this commitment through the mayor's "zero accident" declaration; the development of an integrated monitoring system; and collaboration among stakeholders. All three dimensions of commitment are evident in this series of actions. Affective commitment is evident through the government's concern and direct involvement; normative commitment through compliance with regulations and moral responsibilities; and sustained commitment through consistently maintained oversight and coordination mechanisms.

Keywords: Organizational Commitment; Zero Accidents; Free Nutritious Meal Program; Surakarta City Government.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam memastikan kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif. Kepala daerah bersama perangkat daerah tidak hanya berperan dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dilaksanakan memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks program publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena kualitas pelaksanaan program secara langsung berhubungan dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini memiliki cakupan pelaksanaan luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mulai dilaksanakan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

secara nasional pada tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Meskipun memiliki tujuan sosial yang penting, pelaksanaan MBG menghadapi tantangan, khususnya berkaitan dengan keamanan pangan. Berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan pangan. Program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat justru dapat menimbulkan risiko apabila proses penyediaan, pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan tidak dikendalikan secara memadai.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan prosedur, tetapi juga oleh kesungguhan aktor pelaksana dalam menjalankannya. Dalam konteks ini, komitmen organisasi menjadi penting karena komitmen dapat mendorong anggota organisasi untuk menerima tujuan, terlibat dalam pelaksanaan, serta mempertahankan tindakan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Meyer dan Allen (1991) mengembangkan *Three-Component Model of Organizational Commitment* yang membagi komitmen ke dalam tiga dimensi, yaitu *affective commitment, normative commitment,* dan *continuance commitment*. Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan dan keinginan untuk terlibat, komitmen normatif berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab moral, sedangkan komitmen berkelanjutan berkaitan dengan pertimbangan untuk mempertahankan keterlibatan dalam organisasi.

Dalam penelitian ini, konsep tersebut diadaptasi ke dalam konteks organisasi publik. Komitmen afektif dilihat melalui keterlibatan dan kepedulian Pemerintah Kota Surakarta terhadap keberhasilan dan keselamatan pelaksanaan MBG. Komitmen normatif dilihat melalui kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional, serta kesadaran akan tanggung jawab moral. Sementara itu, komitmen berkelanjutan dilihat melalui upaya menjaga kesinambungan program, termasuk mekanisme pengawasan, koordinasi, dan evaluasi sebagai bentuk konsistensi kebijakan.

Urgensi penelitian semakin kuat karena terdapat perbedaan kondisi antara sejumlah daerah yang mengalami kasus keracunan MBG dengan Kota Surakarta yang pada periode penelitian belum mengalami kejadian tersebut. Pemerintah Kota Surakarta secara terbuka mendeklarasikan komitmen "Solo *Zero Accident* Pelaksanaan Program MBG". Deklarasi tersebut pertama kali disampaikan secara terbuka oleh Wali Kota Surakarta pada September 2025 dan selanjutnya terus disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Komitmen tersebut menarik untuk dikaji karena tidak berhenti pada pernyataan pimpinan. Pemerintah Kota Surakarta membentuk Satgas MBG, melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, melakukan pengawasan bahan pangan, pengawasan keamanan pangan matang, inspeksi kesehatan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

lingkungan, inspeksi lapangan, menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, serta melakukan koordinasi lintas sektor. Satgas MBG sendiri dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 500.2/400 Tahun 2025 dan melibatkan unsur pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu mengenai komitmen organisasi telah banyak dilakukan, baik dalam konteks organisasi privat maupun publik. Penelitian mengenai *Zero Accident* juga berkembang terutama dalam konteks keselamatan kerja dan organisasi industri. Zwetsloot et al. (2017), misalnya, menempatkan *Zero Accident Vision* sebagai pendekatan yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan kepemimpinan dalam membangun budaya keselamatan. Sementara itu, penelitian dalam sektor publik lebih banyak membahas komitmen aparatur dalam kaitannya dengan pelayanan publik, motivasi, dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana komitmen organisasi pemerintah daerah diterapkan dalam program publik yang memiliki risiko keamanan pangan seperti MBG.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Zero Accident pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bentuk komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Zero Accident pada pelaksanaan Program MBG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam tindakan, keterlibatan, dan proses yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan *Zero Accident* pada pelaksanaan Program MBG. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai fenomena berdasarkan informasi yang diberikan informan serta kondisi yang ditemukan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan koordinasi, pengawasan, dan penjaminan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Sekretariat Daerah memiliki posisi penting dalam koordinasi Satgas MBG, sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalankan fungsi teknis pengawasan sesuai bidang kewenangannya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan serta pengawasan MBG. Informan utama berasal dari unsur Sekretariat Daerah/Sekretariat Satgas MBG, sedangkan informan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

pendukung berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, regulasi, pemberitaan media, dan sumber dokumentasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG dan komitmen *Zero Accident*.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami objek dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dikondensasikan berdasarkan fokus penelitian dan dianalisis menggunakan tiga dimensi komitmen Meyer dan Allen, yaitu komitmen afektif, normatif, dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Respons Kebijakan sebagai Fondasi Komitmen Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta mulai terlihat sejak tahap awal penerimaan dan respons terhadap kebijakan MBG. Setelah menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4062/SJ Tahun 2025 mengenai pembentukan Satgas percepatan penyelenggaraan MBG di daerah, Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjutinya dengan membentuk Satgas MBG. Satgas tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 500.2/400 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta Tahun 2025–2030.

Pembentukan Satgas menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menerima kebijakan secara administratif, tetapi menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam struktur kerja daerah. Satgas menjadi instrumen koordinasi yang mempertemukan perangkat daerah dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan MBG. Selain pembentukan Satgas, Wali Kota juga secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan Satgas, SPPG, Koordinator Wilayah BGN, dan pihak terkait lainnya untuk menyatukan pemahaman mengenai pelaksanaan program.

Jika dianalisis menggunakan teori Meyer dan Allen, pembentukan Satgas terutama menunjukkan komitmen normatif karena merupakan respons terhadap arahan dan ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menunjukkan kesediaan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Sementara itu, intensitas koordinasi memperlihatkan komitmen afektif, karena pemerintah tidak sekadar menjalankan kewajiban administratif, tetapi terlibat aktif

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

dalam membangun kesepahaman dan memastikan keberhasilan program.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komitmen organisasi dalam konteks pemerintahan tidak selalu muncul dalam bentuk pernyataan langsung mengenai "komitmen". Komitmen dapat dibaca melalui tindakan organisasi ketika menerima sebuah kebijakan. Kecepatan membangun struktur koordinasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap konsekuensi pelaksanaan kebijakan dan berusaha mempersiapkan organisasi sebelum program berjalan lebih luas.

Temuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program MBG. Dengan demikian, respons Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan kemampuan menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi tindakan operasional di tingkat daerah.

2. Deklarasi *Zero Accident* sebagai Penguatan Nilai Organisasi

Komitmen Pemerintah Kota Surakarta kemudian diperkuat melalui deklarasi *Zero Accident* yang disampaikan secara konsisten oleh Wali Kota Surakarta. Deklarasi pertama kali disampaikan pada 25 September 2025, ketika kasus keracunan MBG di berbagai daerah sedang menjadi perhatian. Wali Kota menyatakan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta melalui Satgas MBG adalah mencapai *Zero Accident* dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian serta pengawasan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Deklarasi tersebut selanjutnya tidak berhenti pada satu forum. Wali Kota menyampaikan kembali komitmen tersebut dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika memberikan peringatan kepada pengelola SPPG. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar dapat dikenai tindakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Zero Accident* ditempatkan sebagai standar yang harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Pada tingkat internal organisasi, nilai tersebut diperkuat melalui penanaman tanggung jawab moral. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan terbaik dalam pelaksanaan MBG dipahami sebagai bentuk ibadah. Bahkan pengawasan keamanan pangan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai "panggilan hati". Salah satu informan menjelaskan bahwa perangkat daerah terkait bahkan melakukan pemantauan tanpa harus selalu diperintahkan.

Kondisi tersebut terutama mencerminkan komitmen normatif. Meyer dan Allen (1991) menjelaskan komitmen normatif sebagai keterikatan yang didasarkan pada rasa kewajiban, norma, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab menjaga keamanan pangan tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban formal ASN, tetapi mulai

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

diinternalisasikan sebagai nilai moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, deklarasi tersebut juga mengandung dimensi afektif. Dukungan jajaran terhadap komitmen pimpinan memperlihatkan adanya keterlibatan dan penerimaan terhadap tujuan *Zero Accident*. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa komitmen tersebut penting karena kegagalan menjaga keamanan pangan dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat, pemenuhan gizi, dan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, deklarasi *Zero Accident* dapat dipahami bukan hanya sebagai komunikasi politik atau slogan kebijakan. Deklarasi berfungsi sebagai instrumen kepemimpinan untuk membentuk arah bersama dalam organisasi. Konsistensi penyampaian pesan membuat keselamatan pangan menjadi nilai yang terus diingat dan diterjemahkan oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa komitmen organisasi dalam sektor publik dapat memiliki dimensi nilai yang lebih luas dibandingkan hubungan antara pekerja dan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, komitmen berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, deklarasi pimpinan menjadi penting apabila berhasil diterjemahkan menjadi nilai dan tindakan organisasi.

3. Sistem Pengawasan sebagai Bentuk Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Pemerintah Kota Surakarta selanjutnya diwujudkan melalui sistem pengawasan yang relatif komprehensif. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi dibagi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap bahan pangan mentah, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan matang, higiene sanitasi, dan pelatihan bagi penjamah pangan.

Pengawasan bahan pangan mentah dilakukan dengan menyesuaikan jadwal menu MBG. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan kepala dapur untuk mengetahui bahan yang digunakan dan melakukan *monitoring* apabila bahan tersebut termasuk dalam kewenangan pengawasan. Pengawasan juga dilakukan pada waktu kedatangan bahan sesuai karakteristik masing-masing bahan pangan. Apabila ditemukan bahan yang tidak layak atau berpotensi membahayakan, bahan tersebut dapat ditahan dan tidak diolah.

Sementara itu, Dinas Kesehatan melakukan pelatihan keamanan pangan kepada seluruh karyawan SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, serta tindak lanjut pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Puskesmas juga dilibatkan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin terhadap SPPG yang berada dalam wilayah kerjanya.

Selain pengawasan teknis, Pemerintah Kota Surakarta

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

melakukan pengawalan terhadap perizinan SPPG. Pemerintah daerah menekankan bahwa pendirian dapur harus memenuhi persyaratan keamanan bangunan, pengelolaan limbah, higiene, dan penyajian makanan. Bahkan sebelum seluruh persyaratan tersebut menjadi perhatian BGN, Pemerintah Kota Surakarta telah berinisiatif menetapkan persyaratan tertentu di tingkat daerah.

Pemerintah juga mengambil langkah preventif ketika melihat potensi ketidakseimbangan jumlah dapur dengan jumlah penerima manfaat. Wali Kota mengajukan permohonan peninjauan kembali dan moratorium pembatasan pendirian dapur agar jumlah SPPG tidak berlebihan dan pengelolaannya tetap dapat dikendalikan.

Mekanisme pengawasan diperluas melalui kanal pengaduan masyarakat. Satgas MBG menggunakan ULAS dan menyediakan *dashboard* khusus MBG untuk menerima laporan mengenai bangunan, sarana prasarana, produk makanan, maupun lingkungan. Setiap aduan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Inspeksi mendadak juga dilakukan secara rutin. Satgas MBG melakukan sidak setidaknya satu kali dalam seminggu atau ketika terdapat aduan masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota atau Wakil Wali Kota ikut memimpin secara langsung. Misalnya, sidak dilakukan pada SPPG Gandekan dan Karangasem setelah muncul laporan mengenai kualitas menu, serta pada SPPG Mojosongo setelah menu dari dapur tersebut menjadi perhatian publik.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan komitmen berkelanjutan sebagai dimensi yang paling dominan pada tahap pengawasan. Dalam operasionalisasi penelitian ini, komitmen berkelanjutan dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan program melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan konsistensi kebijakan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan secara rutin, kanal pengaduan yang terus dibuka, serta inspeksi yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa komitmen *Zero Accident* telah diterjemahkan menjadi mekanisme kerja.

Meskipun demikian, beberapa tindakan dalam sistem pengawasan juga memperlihatkan dimensi komitmen lainnya. Pendampingan terhadap SPPG yang terkena *suspend* menunjukkan komitmen afektif, karena pemerintah tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga membantu SPPG memperbaiki kekurangan agar dapat memenuhi persyaratan dan beroperasi kembali. Ketegasan terhadap SPPG yang melanggar ketentuan menunjukkan komitmen normatif, karena pemerintah menempatkan kepatuhan terhadap standar sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan program.

Dengan demikian, sistem pengawasan Pemerintah Kota Surakarta dapat dipahami sebagai titik penting dalam menghubungkan komitmen dengan praktik. Deklarasi

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Zero Accident akan kehilangan makna apabila tidak diikuti mekanisme untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki potensi masalah. Dalam konteks ini, sistem pengawasan menjadi instrumen yang menerjemahkan komitmen pimpinan menjadi rutinitas kelembagaan.

4. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Pembentukan *Shared Commitment*

Program MBG memiliki rantai pelaksanaan yang kompleks sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Puskesmas, TP PKK, BGN, pengelola SPPG, serta masyarakat. Masing-masing aktor menjalankan fungsi sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Dinas Kesehatan bersama Puskesmas berperan dalam pengawasan kesehatan, higiene sanitasi, dan gizi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap bahan pangan. TP PKK turut terlibat dalam pengawasan kelompok penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang membutuhkan perhatian khusus. Masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui mekanisme pengaduan.

Salah satu bentuk pelibatan masyarakat adalah penyelenggaraan *showcase* menu MBG pada kegiatan *Car Free Day*. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi dan transparansi mengenai menu, standar penyajian, dan komposisi gizi. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai penerimaan menu. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 24 SPPG berpartisipasi dan sekitar 2.300 kupon makanan dibagikan kepada masyarakat.

Koordinasi antar-pihak kemudian diintegrasikan melalui Satgas MBG. Mekanisme tersebut membentuk sistem koordinasi satu pintu. Apabila ditemukan persoalan dalam pengawasan, perangkat yang menemukan masalah dapat melaporkannya melalui jalur koordinasi hingga Satgas mengambil tindakan yang diperlukan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta berkembang dari komitmen individual pimpinan menjadi komitmen kolektif (*shared commitment*). Dalam perspektif Meyer dan Allen, terdapat perpaduan dimensi afektif, normatif, dan berkelanjutan. Dimensi afektif terlihat dari keterlibatan berbagai aktor dalam memastikan keberhasilan program; dimensi normatif terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai kewenangan dan ketentuan; sedangkan dimensi berkelanjutan terlihat dari koordinasi dan mekanisme kerja sama yang terus dipertahankan.

Kolaborasi juga penting karena kompleksitas MBG membuat pengawasan membutuhkan berbagai kompetensi. Keamanan bahan pangan, kesehatan, higiene sanitasi, lingkungan, sarana prasarana, distribusi, dan penerimaan

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat ditangani oleh satu organisasi. Pembagian fungsi memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih spesifik, sedangkan Satgas berfungsi menghubungkan berbagai fungsi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Zero Accident* tidak dapat dijelaskan hanya melalui tindakan Wali Kota. Kepemimpinan memang menjadi titik awal penting dalam membangun arah organisasi, tetapi keberlanjutan komitmen bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah arah tersebut menjadi sistem kerja yang melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi mekanisme yang memperkuat komitmen organisasi sekaligus memperluas kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. Sintesis Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan *Zero Accident*

Jika keseluruhan temuan dianalisis berdasarkan tiga dimensi Meyer dan Allen, komitmen Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan karakter yang multidimensional. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam rangkaian pelaksanaan program.

Komitmen afektif terlihat dari kepedulian dan keterlibatan pemerintah terhadap keselamatan penerima manfaat. Bentuknya antara lain intensitas koordinasi, keterlibatan langsung pimpinan dalam pengawasan, pendampingan terhadap SPPG yang mengalami masalah, pelibatan masyarakat, serta upaya membangun hubungan dengan mitra strategis.

Komitmen normatif terlihat melalui kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat, pemenuhan persyaratan SPPG, penegakan standar, dan internalisasi tanggung jawab moral. Pernyataan bahwa menjaga keamanan pangan merupakan "panggilan hati" memperlihatkan bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat mulai ditempatkan sebagai nilai yang harus melekat pada pelaksana program.

Sementara itu, komitmen berkelanjutan paling jelas terlihat dalam pembangunan sistem pengawasan. *Monitoring* rutin, inspeksi lapangan, pengaduan masyarakat, koordinasi satu pintu, evaluasi, dan mekanisme tindak lanjut menunjukkan bahwa *Zero Accident* telah diterjemahkan menjadi sistem yang dipertahankan dalam pelaksanaan program.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen organisasi pemerintah daerah tidak cukup dipahami sebagai kesediaan untuk mendukung kebijakan. Komitmen menjadi bermakna ketika terdapat kesinambungan antara apa yang dinyatakan pimpinan, nilai yang ditanamkan kepada aparatur, kepatuhan terhadap aturan, dan sistem yang digunakan untuk mengawal pelaksanaan program.

Dalam konteks tersebut, *Zero Accident* di Kota Surakarta dapat dipahami sebagai hasil dari proses kelembagaan yang berlangsung secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari respons terhadap

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

kebijakan, diperkuat melalui deklarasi pimpinan, diterjemahkan melalui pengawasan, kemudian dipertahankan melalui kolaborasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa komitmen tidak bersifat statis, melainkan diwujudkan melalui tindakan organisasi yang saling berhubungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen organisasi dalam mewujudkan *Zero Accident* pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui deklarasi pimpinan, tetapi melalui rangkaian tindakan yang membentuk mekanisme kelembagaan dalam pelaksanaan program.

Pertama, komitmen dibangun sejak tahap awal melalui respons terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pembentukan Satgas MBG dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya kesiapan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan di tingkat daerah. Kedua, komitmen diperkuat melalui deklarasi Solo *Zero Accident* oleh Wali Kota Surakarta yang secara konsisten disampaikan dalam berbagai kesempatan dan kemudian diinternalisasikan kepada jajaran pemerintah sebagai nilai dan tanggung jawab bersama.

Ketiga, komitmen diwujudkan secara berkelanjutan melalui sistem pengawasan yang mencakup pengawasan bahan pangan, keamanan pangan matang, higiene sanitasi, pelatihan, perizinan, inspeksi lapangan, pengaduan masyarakat, evaluasi, dan penindakan. Keempat, komitmen tersebut berkembang menjadi komitmen bersama melalui kolaborasi antara perangkat daerah, BGN, SPPG, Puskesmas, TP PKK, dan masyarakat.

Berdasarkan perspektif Meyer dan Allen, ketiga dimensi komitmen ditemukan dalam pelaksanaan MBG di Kota Surakarta. Komitmen afektif tampak melalui keterlibatan dan kepedulian terhadap keselamatan penerima manfaat; komitmen normatif tampak melalui kepatuhan terhadap ketentuan serta tanggung jawab moral; sedangkan komitmen berkelanjutan tampak melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi yang dipertahankan secara konsisten.

Dengan demikian, pencapaian *Zero Accident* dalam pelaksanaan MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil dari keberadaan regulasi atau keberhasilan teknis pengawasan. Kondisi tersebut merupakan hasil dari komitmen organisasi yang diterjemahkan secara bertahap ke dalam kepemimpinan, nilai organisasi, sistem pengawasan, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Ke depan, keberlanjutan *Zero Accident* memerlukan penguatan koordinasi, pengawasan berbasis informasi, serta konsistensi penerapan standar seiring dengan perkembangan jumlah SPPG dan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the Workplace:*

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Theory, Research, and Application. Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 74(4), 473–484. https://doi.org/10.1111/puar.12339

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61–89. https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z

Perry, J. L., & Hondeghem, A. (2008). Motivation in public management: The call of public service. *Public Administration Review*, 68(1), 3–15. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00830.x

Zwetsloot, G. I., Aaltonen, M., Wybo, J.-L., Saari, J., Kines, P., & Beeck, R. O. (2017). The case for research into the Zero Accident Vision. *Safety Science*, 58, 41–48. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.01.026

Website:

Antara. (2025, October 13). Nol kasus, IFSR: Solo catat prestasi terbaik Program MBG di Jateng. Antara.

RRI. (2026, March 12). Respati pastikan Pemkot selalu buka ruang laporan SPPG, menjaga Zero Accident.

RRI. (2026, July 17). Komitmen Zero Accident, Pemkot Surakarta gelar rakor Program MBG.

Solopos. (2026, March 12). Respons aduan warga, Satgas MBG Solo monitor SPPG Gandekan dan Karangasem.

Tempo. (2025, September 26). Daftar kasus keracunan MBG di berbagai daerah sejak Januari–September 2025.

Tempo. (2026, March 14). Sidak SPPG, Wali Kota Solo soroti kualitas menu MBG.

Peraturan:

Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 500.3/400 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.